PERAN APARATUR DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

(Study Kasus Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)

Artikel Skripsi

Oleh :

FATHOR RAHMAN

NPM : 715.2.2.0900

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIRARAJA

SUMENEP

2019

PERAN APARATUR DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Study Kasus Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)

Artikel Skripsi

Program Studi : Akuntansi

Diajukan Oleh :

FATHOR RAHMAN

NPM : 715.2.2.0900

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIRARAJA

2019

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 16 Juli 2019

Isnani Yuli Andini.,SE.M.AK

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fathor Rahman

Npm : 715.2.2.0900

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak **Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERAN APARATUR DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Study Kasus Desa Kebun Dadap Timur)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep

Pada tanggal : 28 Agustus 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

EA3B1AFF559834637

6000

ENAM RIBU RUPIAH

(FATHOR RAHMAN)

PERAN APARATUR DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Study Kasus Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)

Fathor Rahman[1]
Isnani Yuli Andini[2]

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wiraraja,Sumenep

rahman110896@gmail.com

lia@wiraraja.ac.id

Abstrak

Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi ini, aparatur desanya masih bekerja sesuai dengan kewenangannya sendiri, masih mementingkan kepentingan politik dan kurangnya integritas. Hal ini yang menjadi prioritas permasalahan utama penghambat terwujudnya pemerintahan desa yang Good Governance. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah peran aparatur desa dalam mewujudkan good governance di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Interpretif. Penelitian ini juga menggunakan hasil wawancara dan observasi pada objek penelitian untuk memperoleh data. Hasil Penelitian dilapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Alokasi Dana Desa di desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi sudah menjalankan prinsip Good Governance. Hubungan kerjasama antara Aparatur Desa dengan Masyarakat yang terjalin sudah baik. semua sudah bekerja saling mendukung. Hanya saja terkadang permasalahan terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga terjadi pemberitaan yang membuat masyarakat berpandang negatif. Dalam mendukung terwujudnya Good Governance masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya sepuluh prinsip-prinsip Good Governance. Dan Ke Profesionalan Aparatur desa masih dikatakan belum baik. Dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam alokasi dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan,dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

Kata Kunci : Peran Aparatur Desa, dan Good Governance

Abstrack

This Garden Village in the East of Saronggi Subdistrict, the village apparatus still works in accordance with its own authority, is still concerned with political interests and lack of integrity. This is the priority of the main problems that inhibit the realization of village governance that is good governance. The purpose of this study is to identify the problem of the role of village officials in realizing good governance in the Village of Kebundadap Timur, Saronggi District. This study uses Qualitative Research Methods with Interpretive approaches. This study also uses the results of interviews and observations on research objects to obtain data. Research results in the field can be concluded that in the Village Fund Allocation in Kebun Dadap Timur village, Saronggi Subdistrict, it has implemented the principle of Good Governance. The cooperative relationship between the Village Apparatus and the Community that has been established is good.

all have worked to support each other. It's just that sometime problems occur because usually not all activities can be informed to the public so that new occurs that makes the public look negative. In supporting the realization of community good governance as one of the tools to encourage the implementation of ten principles of good governance. and the Professionalism of the Village Apparatus is still said to be not good. In the process of making a decision in the allocation of funds made in writing available to citizens in need, with each decision taken has met ethical standards and values that apply, and in accordance with the principle of prope administration.

Keywords *: Role of Village Apparatus, and Good Governance*

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia sejak tahun 1945 dalam alinea ke IV mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam perkembangan zaman yang sangat pesat ini dan sebagai akibat dari pembangunan nasional ternyata banyak memberikan pengaruh besar pada tatanan pemerintahan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak yang besar, di mana setiap desa mempunyai hak dan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pemerintahannya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Dana Desa (DD). Dengan adanya dana desa ini membuat jumlah pendapatan desa semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pertanggung jawaban yang baik. Sejalan dengan hal tersebut menteri dalam negeri yang mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang tata kelola pemerintahan Desa menjelaskan bahwa pendapatan desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa .

Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi ini dalam melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya dalam mengelola

kemampuan dan potensi yang dimiliki, dituntut untuk dilakukan secara transparansi dalam memberikan informasi, partisipatif untuk terlibat, dan memiliki akuntabiltas yang tinggi. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Seperti Bentuk pertanggung jawaban publik oleh pemerintah salah satunya ialah akuntabilitas hukum dan peraturan. Di mana akuntabilitas hukum dan peraturan yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu diadakan audit kepatuhan(Mardiasmo, 2002).

Dalam pemerintahan "desa" terutama di desa kebun dadap timur ini yang menjadi objek penelitian, pasti juga memiliki aparatur desa yang bertugas untuk membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan pemerintahan desa agar kehidupan warga menjadi tertib dan teratur. Akan tetapi masih adanya aparatur desa yang masih melanggar dengan kebijakan yang sudah disepakati tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat desa menjadi berkurang. dan pendanaan untuk program pembangunan desa masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat, seharusnya aparatur desa lebih kreatif dalam mengelola desanya misalnya seperti mengadakan usaha Bumdes yang sekiranya tidak usah menunggu bantuan dari pemerintah pusat dalam kebutuhan dan pemberdayaan masyarakatnya. Seorang kepala desa yang sudah lama bekerja sebagai kepala desa akan mampu lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang baru bekerja sebagai kepala desa, dan dengan pengalaman tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya sebagai Aparatur pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti menemukan beberapa masalah seperti banyaknya aparatur desa yang bekerja sesuai dengan kewenangannya sendiri, masih mementingkan kepentingan politik, dan kurangnya integritas. Sehingga tujuan untuk menjadi pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai dan terpenuhi. Sehubungan dengan

permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Peran Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance** (study kasus Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi)**"**.

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Desa

UU Nomor 22 Tahun 1999 "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dengan sistem pemerintahan yang Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang disebut mandiri yang berada di dalam Sub sistem Pemerintahan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Pemerintahan Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1-2), pemerintahan Desa adalah suatu penyelenggaraan mengenai urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

C. Konsep dan Definisi Desa

Menurut Zakaria dalam (WAHJUDIN, 2011) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan desa dengan serangkaian peraturan yang akan ditetapkan, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

D. Peran Aparatur Desa

Memiliki tugas untuk membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan desanya agar kehidupan warga menjadi tertib dan teratur. Berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,undang-undang No.32 Tahun 2004.

E. *Good Governance* (GG)

Good Governance merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian suatu keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama-sama. Sebagai suatu konsep yang dicapai dalam suatu pemerintahan desa. Kunci utama dalam memahami *good governance* adalah memahami dari prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, dengan menyadari pentingnya masalah yang terjadi dalam pemerintahan desa.

Metode Penelitian

A. **Jenis penelitian**

"jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan penelitian ini memfokuskan pada suatu gambaran secara lengkap mengenai suatu bentuk permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian kualitatif cenderung lebih panjang dalam proses pengerjaanya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dengan penelitian tentang Peran Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2019 sampai sekarang dan kemungkinan berakhir pada bulan April 2019.

C. Sumber Data

Berdasarkan sumber data, peneliti menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan juga melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang akan diteliti oleh peneliti (Umar, 2003).

Dalam penelitian ini, data yang sesuai adalah data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang akan diperoleh langsung ke tempat objek penelitian melalui pendekatan observasi dan wawancara ke objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang valid.

D. Informan

Informan dalam penelitian ini adalahmendapatkan informasi langsung dari kepala desa Budiyono.SH. dan Aparatur Desa lainnya yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini, dan mendapatkan informasi tambahan dari masyarakat sekitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan umtuk menganalisa masalah serta penulis mengumpulkan data yang harus relevan dengan permasalahannya. Dalam melakukan penelitian seperti sebagai berikut :

1. Observasi

   Merupakan suatu proses mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan metode yang diterapkan ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap objek untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul di Desa Kebun dadap timur kecamatan saronggi.

2. Wawancara

   Adalah melakukan sesi tanya jawab yang secara lisan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang terpercaya seperti kepala desa, sekretaris, bendahara dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan yang dianggap penting untuk mengetahui lebih dalam tentang informasinya. Peneliti akan menanyakan bagaimana peran sebagai aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan pemerintahan desa.

3. Dokumentasi

   Metode ini adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen penting dengan menggunakan bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi yang terkait oleh suatu penjelasan dan keterangan dari pihak objek penelitian. Dokumentasi

ini juga akan dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang akan dikembangkan dalam proses ini secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung (Miles dan Huberman). Ada tiga proses analisis data yang akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut :

1. Reduksi Data

   Data yang dikumpulkan peneliti dari hasil observasi dan wawancara dikumpulkan dengan cara merangkum,dan memilih hal-hal yang pokok. Pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan good governance di desa kebun dadap timur Kecamatan Saronggi ini yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Maka informasi yang diperoleh oleh peneliti akan dikelompokkan sesuai dengan datanya.

2. Penyajian data

   Dalam penyajian data ini, peneliti akan menyajikan data yang berupa jawaban yang diberikan oleh sumber informan yang sebelumnya sudah dikumpulkan sesuai dengan proses reduksi data, data ini akan dikelompokkan sesuai dengan bentuk penyajian data yang berupa teks naratif berbentuk catatan laporan di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

   Dari hasil analisis data yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini peneliti akan mengambil beberapa kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang sudah dikumpulkan dan digolongkan dalam proses pengumpulan data seperti tindakan yang dilakukan dalam proses yang peneliti lakukan di lapangan.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik uji triangulasi. Triangulasi ini merupakan suatu

proses pengecekan data melalui berbagai sumber data dengan cara dan waktu yang berbeda. Dalam hal ini peneliti akan mengecek kesamaan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda pula, baik dari sumber internal maupun eksternal. Peneliti juga akan mengecek dari segi yang diperoleh seperti observasi wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan waktu yang berbeda, sehingga data yang dapat diperoleh menghasilkan data-data yang valid dan absah.

Hasil penelitian dan pembahasan

Prinsip–prinsip dalam mewujudkan good governance

1. Transparansi

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Sumenep cukup baik, dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Hal ini di buktikan dengan penjelasan Bapak Budiyono selaku Kepala Desa Kebun Dadap Timur dan Yayan Bendahara Desa yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sudah melakukan perannya dalam mewujudkan Good Governance dengan menerapkan 10 prinsip, untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan 10 prinsip tersebut. Pada prinsip pelaksanaan Transparansi di Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi Sumenep, hasil penelitian menunjukan bahwa dalam prinsip pelaksanaan Transpransi Dana Desa Atau Alokasi Dana Desa di Desa Kebun Dadap Timur ini, Dari setiap pembangunan desa yang di lakukan dengan baik di karenakan adanya keterbukaan atau transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada tingginya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap peroses pengelolaan keuangan Desa. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak yayan selaku bendahara di Desa Kebun Dadap Timur bahwa sudah melakukan transparansi dalam bentuk poster serta melibatkan

masyarakat dalam menganggarkan pengeluaran keuangan desa yang sumber penerimaannya bersumber dari dana desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), yang nantinya akan dijadikan sumber dana pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Akuntabilitas

Prinsip pertanggung jawaban dan Hasil penelitian menunjukan bahwa desa sudah melakukan pertanggung jawaban cukup efektif dengan melibatkan masyarakat di dalamnya, dari penggunaan dana untuk kepentingan pembangunan desadan kesejahteraan desa, Serta menyampaikan laporan keuangan APBDesa kepada masyarakata disetiap acara musrenbangdes. Dan perangkat desaamelakukan tanggung jawabnya secara maksimal dan laporan Pertanggung Jawaban Desa kebundadap Timur di susun olehapemerintah Desaa selaku penanggung jawaban pelaksana kegiatan. Maka berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa iplementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Kebun Dadap Timur dalam upaya mewujudkan Good Governance cukup baik dan efektif hal ini di lihat dari pembangunan desa yang bagus, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan adanya pemerintahan desa yang sekarang.

3. Partisipasi

Prinsip partisipasi dan hasil penelitian menunjukan bahwa setiap anggaran yang diperuntukkan untuk perencanaan pembangunan dan kesejahteraan Desa sudah melibatkan masyarakat di dalamnya,dan desa juga membentuk tim untuk memverifikasi, untuk memprioritaskan mana yang akan terlebih dahulu dilakukan pembangunan, setelah itu ada prioritas tertentunya yang sifatnya emergency yang harus dilakukan tentunya akan di sesuaikan dengan baku anggaran yang sudah di anggarkan Desa. jadi karena adanya keterbukaan dari Desa terhadap masyarakat sehingga tingkat pengawasan dan partisipasi masyarakat tinggi

4. Efektifitas dan Efisiensi

Prinsip Efektifitas dan Efisiensi Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa mengefektifkan dan mengefesiensikan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa dengan cara ikut melibatkan masyarakat, karena proses untuk dijadikan APBDesa dari dana itu tidak serta merta itu atas keinginan dari kepala Desa, masyarakat bisa mengusulkan di RT setelah itu di Dusun akhirnya ke musyawarah Desa (MUSDES) sehingga dengan seperti itu akan sangat efektif masyarakat untuk ikut berpartisipasi karena sudah tau bahwa dirinya sendiri yang mengusulkan itu, dan nanti akan dimusyawarahkan dan dibentuk tim yang mana yang perlu di prioritaskan terlebih dahulu, dan Efisiensi merupakan proses dimana pemerintah Desa Kebun Dadap Timur dan lembaga-lembaga menyesuaikan dengan kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

5. Responsif

Berdasarkan hasil penelitian mengenai PrinsipResponsive di Desa Kebun Dadap Timur menunjukan bahwa dalam mewujudkan syarat-syarat yang harus dicapai sebagai langkah pertama untuk pelaksanaan Good Governance ini. Maka Desa Kebun Dadap Timur melakukan cepat tanggap terhadap permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ialah sebuah impian dari terwujudnya suatu pemerintahan desa yang Good Governance. Respon pemerintah Desa memahami kebutuhan masyarakat dan memahami permasalahan seperti konflik sosial yang ada di masyarakat tentunya disini suatu pemerintah Desa Kebun Dadap Timur lebih mengerucut ke bawah seperti RT,dan RW yang akan menjadi layanan pengaduan masyarakat, jadi setiap persoalan, permasalahan, dan keluhan yang ada di masyarakat, ketua RT lah yang akan membawa langsung ke musyawarah Desa (MUSDES).

6. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berdasarkan penelitian yang di sampaikan Bapak Budiyono bahwa Desa bukan penegak hukum yang berhak menyatakan bersalah atau tidak, tapi desa itu hanya menerapkan *Rule of low*, jadi setiap permasalahan yang ada di dalam Desa Kebun Dadap Timur ini bagaimana caranya cepat di selesaikan seperti permasalahan penganiayaan, perkelahian dalam rumah tangga danpemerintah Desa selalu melibatkan tiga pilar seperti Babinsa dan Babinkatimbmas sehingga setiap ada permasalahan di masyarakat akan selalu melibatkan tiga kerangka Hukum yang adil dan harus diberlakukan seaadil-adilnya tanpa terkecuali, termasuk hukum-hukum yang terjadi di masyarakat yang menyangkut hak asasi Manusia dalam terwujudnya pemerintahan yang Good Governance.

7. Kesetaraan

Kesetaraan berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Desa Kebun Dadap Timur ini tidak pernah membedakan atau pandang bulu terhadap masyarakat pemerintahannya, menganggap semua itu disamakan dalam artian memiliki hak-hak dan kewajiban tersendiri. Good Governance memang juga didukung atas asas kesetaraan, jadi disetiap masyarakat meskipun siapa saja tidak ada yang dibedakan dalam segi pelayanan dan dalam segi perlakuan.

Bapak Budiyono menyampaikan bahwa cara desa dalam memberikan kesetaraan bagi masayarakatnya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Bank BPRS di sektor pegadaian yang tentunya akan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa di sektor Pegadaian, jadi ketika masyarakat yang ingin menggadaikan apa saja akan lebih mudah dan efektif jika butuh modal untuk membuka sebuah usaha, dan peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akan cepat meningkat secara drastis sehingga anggaran ADD di desa itu yang mau menggerakkan Bumdes seperti halnya pegadaian dapat memberikan stimulus bantuan untuk penguatan modal bagi masyarakat yang membutuhkannya. Jadi akan

bisa menjunjung tinggi asas keseteraan agar tidak ada yang dibedakan satupun.

8. Daya Tangkap

Hasil penelitian menunjukan bahwa Daya Tangkap di Desa Kebun Dadap Timur dalam mewujudkan good governance ialah meningkatkan dari sebuah ke pekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat Desa Kebundadap Timur yang tanpa terkecuali. Juga setiap aspirasi yang diusulkan masyarakat tentang keluhan terhadap pemerintahan desa tentunya pemerintah desa akan segera mengambil tindakan demi kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat dan aparatur desa. Hal yang sama di sampaikan bapak Sutanto selaku Kadus Arestengah menjelaskan bahwa setiap permasalahan yang ada di Desa yang sifatnya emergency akan di sampaikan kepada kepala Desa dan aparatur desa akan melakukan safari ke setiap RT yang ada di Desa Kebun Dadap Timur. Tapi ketika permasalahannya belum selesai maka akan di musyawarakan kembali di balai Desa.

9. Profesionalisme

Profesionalisme berdasarkan penelitian di Desa Kebun Dadap Timur dalam mewujudkan good governance menunjukan bahwa Aparatur Desa sudah memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap pada setiap kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab aparatur desa dalam melayani masyarakat,bentuk meningkatkan kemampuan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat. Juga untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan juga komitmen dari para anggota mengenai profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang Aparatur Desa.

10. Wawasan ke Depan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan wawasan kedepan di Desa Kebun Dadap Timur dalam mewujudkan good governance sudah di terapkan dengan melakukan pembangun desa berdasarkan visi dan misi yang strategis yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam proses pembangunannya, sehingga masyarakat merasa ikut bertanggung jawab atas kemajuan desanya. dan juga visi strategis yang harus para pemimpin "dan" masyaraka memiliki perspektif dan pandangan jauh ke "depan" "atas" kemajuan tata pemerintahan desa yang "baik" dapat terwujud serta "kepekaan akan apa saja yang "dibutuhkan" untuk" mewujudkan" desa untuk menjadi desa yang Good Governance. Hal yang sama juga di sampaikan Bapak Budiyono selaku Kepala Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi bahwa dalam menjalankan Visi dan Misi tentunya ada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti musyawarah dusun terus dilanjutkan ke musyawarah desa, dengan tujuan untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat dalam membangun dan mensejahterakan desa, dan dalam penempatan pembangun di sesuaikan dengan kesepakatan masyarakat yang tergabung dalam musyawarah dusun serta di lanjutkan dengan musyawarah desa, dan apabila ada yang belum teralisasi akan dilanjutkan tahun depan dengan aspirasi atau ide dari masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di lakukan bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Transparansi

transparasi Pemerintah Desa Kebun dadap Timur memberi rincian jelas terhadap pengunaan dana desa serta membuat poster yang ditempel-tempelkan di tempat umum agar pemerintahannya lebih transparan.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas semua perangkat desa sudah meningkatkan kinerjanya agar hasil yang dicapai dapat maksimal sehingga menjadi pemerintahan yang sudah melakukan pertanggung jawaban cukup efektif dengan melibatkan masyarakat di dalamnya, dari penggunaan dana untuk kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan desa serta menyampaikan laporan keuangan APBDesa kepada masyarakat di acara Musrenbangdes.

3) Partisipasi

Anggaran yang diperuntukkan untuk perencanaan pembangunan dan kesejahteraan Desa sudah melibatkan masyarakat di dalamnya, sehingga tingkat pengawasan dan Partisipasi antara Aparatur Desa dengan Masyarakat tinggi.

4) Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas dan Efisiensi sudah dilakukan dengan cukup baik dengan cara meminimalisir biaya pengeluaran dan mempercepat proses pembangunan sebelum tiba waktunya.

5) Responsive

Desa Kebun Dadap Timur melakukan cepat tanggap terhadap permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ialah sebuah impian dari terwujudnya suatu pemerintahan desa yang Good Governance. Respon pemerintah Desa memahami kebutuhan masyarakat dan memahami permasalahan seperti konflik sosial yang ada di masyarakat.

6) Penegakan Hukum

Desa Kebun Dadap Timur menerapkan hukum *Rule of low*, jadi setiap permasalahan yang ada di dalam Desa Kebun Dadap Timur ini bagaimana caranya cepat di selesaikan seperti permasalahan penganiayaan, perkelahian dalam rumah tangga dan pemerintah Desa selalu melibatkan tiga pilar seperti Babinsa dan Babinkatimbmas sehingga setiap ada permasalahan di masyarakat akan cepat terselesaikan.

7) Kesetaraan

Pemerintah Desa Kebun Dadap Timur ini tidak pernah membedakan atau pandang bulu terhadap masyarakatnya, dan menganggap semua Masyarakat itu sama dalam artian memiliki hak-hak dan kewajiban tersendiri. Good Governance memang juga didukung atas asas kesetaraan, jadi disetiap masyarakat meskipun siapa saja tidak ada yang dibedakan dalam segi pelayanan dan dalam segi perlakuan.

8) Daya Tangkap

Desa Kebun Dadap Timur dalam mewujudkan good governance ialah "meningkatkan kepekaan" para "penyelenggara pemerintah "terhadap aspirasi" "masyarakat" Desa Kebundadap Timur yang "tanpa terkecuali. Perangkat Desa juga dalam mengatasi keluhan dari Masyarakat tentunya agar segera ditangani agar tidak terjadi kesenjangan antara Aparatur Desa dan Masyarakat.

9) Profesional

Aparatur Desa sesuai dengantugas dan tanggung jawabnya terhadap desa dalam melayani masyarakat, bentuk meningkatkan kemampuan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat. Juga komitmen dari para Aparatur Desa mengenai profesi untuk meningkatkan kemampuannya sebagai Aparatur Desa.

10) Wawasan Kedepan

Desa Kebun Dadap Timur dalam mewujudkan good governance sudah di terapkan dengan melakukan pembangunan desa berdasarkan visi dan misi yang strategis yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam proses pembangunan sesuai dengan ketentuannya.

Saran

1) Diharapkan Aparatur Desa lebih Profesional dalam tugasnya.

2) Untuk memenuhi prinsip Partisipasi masyarakat, pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa dalam membangun Desa Kebun Dadap Timur terutama dalam fungsi pengawasan masyarakat. Saran ini juga dapat memenuhi prinsip Akuntabilitas dimana pemerintahan harus memberikan sosialiasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. Y. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, *3*(046).

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik,*. (A. Offset, Ed.) (edisi pert). yogyakarta.

Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa.*Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336–352. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058

Pambudi. (2001). *Politik Pemberdayaan, Jalan mewujudkan Otonomi Desa*. yogyakarta lapera pustaka utama.

Putra, H. S. 2017. (2017). Hendi Sandi Putra 2017, *6*(2), 110–119.

Surasih. (2003). *pemerintah desa dan im plementasinya*. jakarta: erlangga.

Tambuwun, Fernando Victory, Harijanto Sabijono, S. W. A. (2018). Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Stanly W. Alexander, *d*(2), 512–528.

TampubOlon, R. J. (2014). RICHARDO JUNIASTER TAMPUBOLON. *RICHARDO JUNIASTER TAMPUBOLON*, *8*(33), 44.

Umar, H. (2003). *Metode Riset Bisnis*. gramedia pustaka utama jakarta.

WAHJUDIN, S. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. BANDA ACEH REINNFORCEMENT ACTION AND DEVELOPMENT.